PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Senin Tanggal: 26 Agustus 2013 Halaman: 18

# Dana Keistimewaan Juga untuk Malioboro

Yulianingsih

**Penataan Malioboro dinilai sangat penting karena kawasan ini menjadi tujuan wisata di Indonesia.**

YOGYAKARTA — Pemkot Yogyakarta akan menggunakan dana keistimewaan (Danais) dari pemerintah pusat untuk penataan fisik Malioboro.

Selain itu, dana ini juga untuk penataan Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta dan penataan parkir di kawasan Malioboro.

"Fokus utama untuk penataan kawasan Malioboro dan Alun-alun Utara, tetapi juga untuk wilayah lain," ujar Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aman Yuriadijaya, akhir pekan lalu.

Menurutnya, penataan kawasan Malioboro sangat penting karena Kota Yogyakarta menjadi tujuan wisata di Indonesia. Pihaknya, kata Aman, sudah mengajukan usulan penggunaan Danais tersebut ke Pemda DI Yogyakarta sebagai koordinator pemanfaatan Danais.

Aman juga mengatakan pihaknya belum tahu persis berapa Danais yang akan diterima Pemkot tahun ini.

Penghageng II Tepas Parentah Hageng Kraton, KPH Yudho Hadiningrat, menjelaskan rencana Danais Rp 231 miliar akan turun September dan harus dihabiskan dengan tenggat waktu 3 bulan sampai akhir tahun.

Sementara pada tahun 2014 rencananya Danais akan turun Rp 1,4 triliun.

"Penggunaannya berdasarkan pengajuan. Karena waktunya mepet, penggunaan danais tahun ini dilakukan dengan sistem dari bawah ke atas," katanya pada penjaringan aspiirasi danais di Balai Kota Yogyakarta.

Penjaringan aspirasi dan pembahasan dengan Bappeda dilakukan untuk membahas penggunaan Danais tersebut. Penggunaanya akan dikawal dan harus dipertanggunjawabkan.

"Mohon penggunaan Danais disikapi dengan arif. Jangan sampai dengan keistimewaan ini jadi kontra produktif. Misalnya hanya terkesan bagi-bagi duit dengan kegiatan fiktif, sehingga jadi sarang korupsi," tegasnya.

Menurutnya selama penjaringan aspirasi Keistimewaan DIY di empat kabupaten lainnya pemahaman masyarakat terkait keistimewaan perlu ditingkatkan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami terkait sejarah dan makna Keistimewaan DIY. Termasuk pemahamana Danais.

"Di kalangan masyarakat dikiranya Danais dapat digunakan sampai tingkat terbawah. Padahal kewenangan penggunaan Danais ada di Pemda DIY. Itupun terbatas pada lima bidang keistimewaan," paparnya.

Lima bidang keisitimewaan ini ada pada pemilihan jabatan gubenur dan wakil gubenur, kelembagaan daerah, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Ketua Forum Komunikasi Keistimewaan, KPH Wironegoro, mengatakan Keistimewaan Perdais harus diutamakan untuk kepentingan masyarakat.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menambahkan UU Keistimewaan DIY harus didengungkan terus.

"Keistimewaan harus berdampak pada kesejahteraan dan bermanfaat bagi masyarakat," ucap Haryadi.

**Pasar Tradisional**

Terpisah, berkaitan dengan revitalisasi pasar tradisional di Yogyakarta, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Agus Sumbarja, mengatakan kegiatan yang dilakukan Pemkot belum menyentuh substansinya.

Menurut Agus, Pemkot pada tahun 2012 lalu telah melakukan revitalisasi di Pasar Patangpuluhan dan Pasar Demangan. Sedangkan tahun ini sedang dalam proses revitalisasi di Pasar Kranggan.

"Revitalisasi yang dilakukan baru sebatas pemeliharaan bangunan saja, substansinya belum tersentuh," ujar Agus, akhir pekan lalu.

Menurutnya, untuk melakukan revitalisasi secara utuh diperlukan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Namun demikian, jika pemerintah daerah tidak sanggup, maka segala upaya seperti mencari dukungan ke Pemda DIY hingga ke pusat harus dilakukan.

Kata dia, seiring dengan pembangunan infrastruktur pasar yang lebih nyaman, pedagang selaku pelaku utama di pasar tradisional juga turut menjadi bagian dari penataan. Terutama dalam rangka peningkatan kemampuan pedagang dalam menjalankan sistem ekonomi.

"Kalau infrastruktur bagus dan didukung pedagang yang bisa mengelola dagangan dengan baik, maka produk dan distribusinya akan mudah dibenai. Ciri khas pasar tradisional sebagai interaksi sosial tidak boleh hilang," paparnya

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pusek) UGM yang juga Ketua Program Sekolah Pasar, Puthut Indroyono, mengatakan sejak tahun 2011 pasar tradisional mengalami tantangan yang semakin komplek. Khususnya akibat gempuran pasar maupun toko modern yang terus merebak.

"Pedagang sudah mengeluhkan penurunan omset, sehingga waktu itu kami melakukan penelitian dan hasilnya memang demikian," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah baik di daerah maupun pusat seharusnya mulai melakukan konsep revitalisasi pasar. Meski beberapa daerah, termasuk Kota Yogyakarta sudah memulai revitalisasi, namun masih banyak kritik yang dimunculkan, terutama konsep revitalisasi yang masih sebatas pembangunan fisik.

"Kritikan itu cukup beralasan karena banyak aspek lain yang belum disentuh," tambahnya.

Revitalisasi pasar tradisional, kata dia, harusnya melibatkan seluruh elemen yang ada di dalamnya.

ed: rasyidi

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 1. Dinas Pengelolaan Pasar<br>2. Dinas Bangunan Gedung dan Aset<br>3. Badan Perencanaan Pembangunan<br>4. UPT. Malioboro | Netral | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 02 Februari 2025
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**
NIP. 19690723 199603 1 005